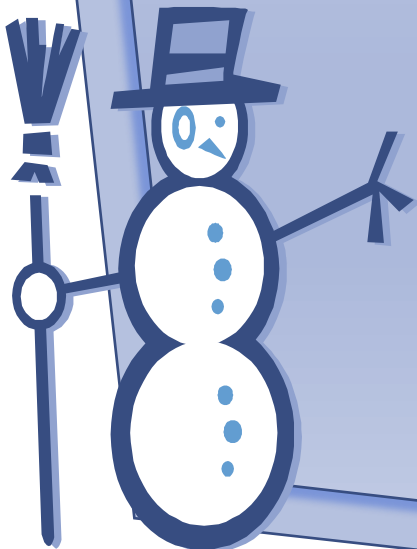




**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**





LAPORAN LKIP

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)
KABUPATEN CIREBON

CONTACT

Telp. / Fax :
0231 - 321710

WEBSITE:
www.dpmd.cirebonkab.go.id

EMAIL:
dispemdes@cirebon.kab.go.id

Alamat :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Muria No. 20 Sumber
Kabupaten Cirebon, 45611

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten, kami telah menyelesaikan penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Penyusunan LAKIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran hasil Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2023, juga sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang.

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak sekali kekurangannya, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

Sumber, Februari 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19800703 199810 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya. Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Cirebon selain berdampak positif juga berdampak negatif sehingga muncul masalah baru dan masih tersisa berbagai masalah penting yang harus segera diatasi.

Mengacu visi misi daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

- a. Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa;
- b. Menyediakan sarana prasarana dan dokumen pendukung kinerja pegawai,

2. Sasaran:

- a. Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa;
- b. Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa;
- c. Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa;
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD;
- e. Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun;
- f. Meningkatnya Jumlah Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Berdasarkan pada kenyataan ini, maka perlu satu upaya untuk mendorong agar desa-desa dapat lebih berkembang, maju dan mandiri. Jika diidentifikasi permasalahan yang ada di desa, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :

1. Masalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa,
2. Masalah lembaga ekonomi desa/Bumdes,
3. Masalah kapasitas pemerintah desa dan BPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Muria No. 20 Sumber
Kabupaten Cirebon, 45611

DAFTAR ISI

	<i>Halaman.</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis	3
1.4 Keadaan Pegawai	3
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	5
1.6 Keuangan	8
1.7 Sistematika Penyajian	8
BAB II RENCANA STRATEGIS, KINERJA DAN ANGGARAN	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.1.1 Visi dan Misi	10
2.1.2 Tujuan Dan sasaran	13
2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
2.3 Rencana Anggaran 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	22
3.2 Efisiensi Anggaran	40
3.3 Realisasi Anggaran	41
3.4 Faktor Keberhasilan dan Kegagalan	44
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Rencana Tindaklanjut	47
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman.</i>
Tabel 1.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian 3
Tabel 1.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 4
Tabel 1.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan 4
Tabel 1.4	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan 5
Tabel 1.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin 5
Tabel 1.6	Data Aset Tanah 6
Tabel 1.7	Daftar Sarana dan Prasarana di DPMD 6
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indokator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 13
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indokator dan Target beserta Anggarannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 16
Tabel 2.3	Belanja Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023 17
Tabel 3.1	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan DPMD Tahun 2023 24
Tabel 3.2	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran IKM DPMD Tahun 2023 26
Tabel 3.3	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran IDM DPMD Tahun 2023 33
Tabel 3.4	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Jumlah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan di APBDes Kabupaten Cirebon Tahun 2023 24
Tabel 3.5	Belanja Daerah DPMD Tahun Anggaran 2023 41
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2023 DPMD Kabupaten Cirebon 42

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman.</i>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
Gambar 3.1 Capaian Indikator Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Cirebon Tahun 2023	23
Gambar 3.2 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2023	25
Gambar 3.3 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2023	32
Gambar 3.4 Capaian Indikator Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan di APBDes Kabupaten Cirebon Tahun 2023	38

PENDAHULUAN

BAB 1

Berisi :

- 1.1 Struktur Organisasi
- 1.2 Fungsi dan Tugas
- 1.3 Isu Strategi
- 1.4 Keadaan Pegawai.
- 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6 Keuangan
- 1.7 Sistematika LKIP

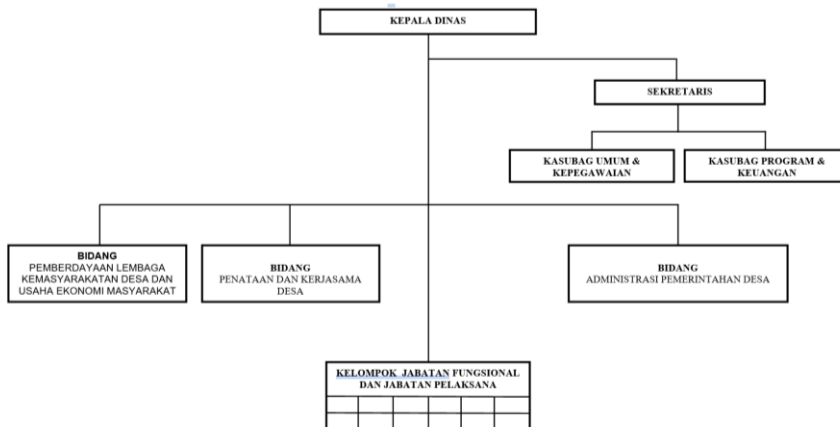
1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 152 Tahun 2023), Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
4. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
5. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON 2023
(Perbup No. 152 Tahun 2023)



1.2 Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai Tugas Pokok sebagaimana tertuang Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 152 Tahun 2023), yaitu:

Tugas Pokok

“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.”

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) Penyelenggaraan penataan desa;
- c) Peningkatan kerja sama desa;
- d) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerin tahan desa;
- e) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g) Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhitungkan dan menganalisis isu-isu strategis dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatannya.

Adapun isi strategis yang ada saat ini antara lain :

- 1) Belum optimalnya penguatan lembaga kemasyarakatan desa;
- 2) Belum optimalnya Penguatan kelembagaan ekonomi desa (Bumdes) yang aktif dan produktif berbasis sumberdaya/potensi unggulan desa;
- 3) Belum optimalnya penguatan pemerintah desa dan BPD
- 4) Masih belum tertatanya kewenangan-kewenangan desa sesuai SDGs Desa

1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebanyak 36 orang, berdasarkan jumlah kebutuhan PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah 45 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon memiliki pegawai sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	26	72,22%
2	CPNS	0	0%
3	Honorier/Kontrak Dinas	10	27.78%
		36	100%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

Jumlah Pegawai ASN berdasarkan klasifikasi eselon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Es-I	Es-II	Es-III	Es-IV	JFT	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat			1	2		3	6
3	Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat			1	0	6	0	7
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa			1	0	5	1	7
5	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa			1	0	2	2	5
	Jumlah		1	4	2	13	6	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	2	3		6
3	Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	4			7
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	3	4			7
5	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	2	2	1		5
	Jumlah	10	12	4		26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S3	S2	S1	SMA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1			1
2	Sekretariat		1	2	3	6
3	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat		2	5		7
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa		4	3	1	7
5	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa		2	2	1	5
	Jumlah		10	12	5	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	5	1
3	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	4
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	4	3
5	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	5	
	Jumlah	18	8

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhitungkan dan menganalisis isu-isu strategis dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatannya.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Cirebon diantaranya peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/ pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional lapangan baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas/ kegiatan. Gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel 1.6 dan Tabel 1.7 sebagai berikut :

Tabel 1.6 Data Aset Tanah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Jenis Barang	Letak/Alamat	Penggunaan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Sunan Muria No.20 Sumber	DPMD
2	Tanah Rawa	Jl. Sunan Muria No.xx Sumber	Sekretariat PKK
3	Tanah Tegalan	Jl. Sunan Malik Ibrahim Sumber	Tanah Exs Bengkok

Tabel 1.7 Daftar Sarana Prasarana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi).	1
2	Lemari Besi/Metal.	13
3	Lemari Kayu	2
4	Rak Kayu	1
5	Filing Cabinet Besi.	16
6	Lemari Kaca.	4
7	Lemari Makan.	2
8	White Board.	2
9	Alat Penghancur Kertas.	5
10	Mesin Absensi.	2
11	LCD Projector/Infocus.	8
12	Meja Kerja Kayu.	6
13	Kursi Kayu.	8
14	Sice.	4
15	Meja Rapat.	20
16	Meja Podium.	1
17	Meja Resepsionis.	1
18	Meja Bundar.	1
19	Meja 1/2 Biro.	16

20	Kursi Tamu.	1
21	Kursi Putar.	8
22	Bangku Tunggu.	4
23	Meja Komputer.	1
24	Sofa.	1
25	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner.	1
26	Mesin Pemotong Rumput.	1
27	Lemari Es.	2
28	AC Split.	27
29	Exhause Fan.	1
30	Televisi.	1
31	Sound System.	1
32	Wireless.	1
33	Camera film.	1
34	Tangga Aluminium.	1
35	Dispenser.	2
36	Handy Cam.	1
37	Alat Pemadam/Portable.	5
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	6
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III.	6
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	1
41	Kursi Rapat Ruangan Rapat	3
42	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II.	1
43	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II.	6
44	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis.	2
45	Audio Mixing Portable.	1
46	Telephone Hybrid.	1
47	Microphone/Wireless MIC.	1
48	Professional Sound System.	1
49	Uninterruptible Power Supply (UPS).	4
50	Digital LED Running Text.	1
51	Stabilizing Amplifier.	2
52	Layar Film/Projector.	1
53	Camera Digital.	2
54	Facsimile.	2
55	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum).	2
56	Mainframe (Komputer Jaringan).	2
57	PC Unit.	27
58	Lap Top.	13
59	Note Book.	1
60	Plotter (Peralatan Mini Komputer).	1
61	Scanner (Peralatan Mini Komputer).	1

62	Monitor.	2
63	Printer (Peralatan Personal Komputer).	26
64	Scanner (Peralatan Personal Komputer).	2
65	Modem.	1

1.6 Keuangan

Dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2023 Total Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 17.690.390.500,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis, program pendukung maupun program penunjang kegiatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan Alokasi anggaran bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 sebesar Rp. 650.000.000,- untuk menunjang kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang di laksanakan di Kabupaten Cirebon.

1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Keadaan Pegawai, Keadaan sarana dan prasarana, dan keuangan serta sistematika penyajian LKIP.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategis 2019-2024, penetapan kinerja dan rencana anggaran Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, realisasi anggaran dan Inovasi

Bab IV Penutup

Mengemukakan Kesimpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB 2

Berisi :

2.1 Rencana Strategis

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2023

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1- 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon merencanakan kegiatannya yang dirumuskan dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran sampai dengan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.1 Visi Dan Misi

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan dengan landasan keyakinan serta dapat mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi.

Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen modern, mulai dari perencanaan

sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diharapkan sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagaimana Visi Kabupaten Cirebon, yaitu : TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menyusun misi yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2019-2024.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan.

Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi dimasa mendatang oleh semua pihak dalam organisasi, lebih jauh pernyataan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna memperlihatkan kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh organisasi yang merupakan tahapan rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Cirebon dalam segala bidang, guna menyiapkan Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman,

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan dalam aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi yang efektif dan efisien, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah, melalui pengembangan agribisnis yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Misi Kabupaten Cirebon Nomor 4 sebagai Misi Dinas PMD, yaitu :
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH.

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon khususnya yang berkaitan pemberdayaan masyarakat dan desa akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut : **MENINGKATKAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA.**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indokator
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa		Meningkatnya jumlah desa Mandiri
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)
	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes

2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk merencanakan langkah-langkah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam menjalankan strategi tersebut perlu diambil langkah-langkah berupa kebijakan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut dan merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut adalah kebijakan umum dan Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program / kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Di Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (Penunjang Urusan) dan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Tujuh (7) Kegiatan, dan Dua Puluh Dua (22) Sub Kegiatan

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.655.424.896,-. Sementara itu Program Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2023 didukung melalui Empat (4) Program, Empat (4) Kegiatan, dan Delapan belas (18) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp. 12.034.965.604,-. Adapun daftar Nama Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Perjanjian kinerja (PERKIN) merupakan komitmen kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi Amanah dan PERKIN tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah, Dalam hal ini adalah antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan Bupati Cirebon.

Perjanjian Kinerja (PERKIN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon mencakup program utama, sasaran, indikator kinerja output, indikator kinerja outcome dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis instansi/unit organisasi yang bersangkutan dan setelah anggaran ditetapkan.

Sasaran dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Perjanjian kinerja yang disusun mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PMD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2023 Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target beserta Anggarannya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target	Anggaran
1	Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	70 Desa	17.690.390.500
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,57 Poin	5.655.424.896
1.2	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,74 Poin	11.287.001.204
1.3	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes	55 %	747.964.400

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran diatas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.5.655.424.896,-. Sementara urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui 4 (empat) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.12.034.965.604,-.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Belanja Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH			17.690.390.500
	BELANJA OPERASI			17.559.093.500
	BELANJA MODAL			131.297.000
	BELANJA NON URUSAN			5.655.424.896
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran • Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur • Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas • Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif • Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral 	100 % 75 % 100 % 100 % 100%	5.655.424.896
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	15 Dokumen	120.685.400
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	39.270.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.856.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	28.456.700
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	28.374.000
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.728.700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun	45 Dokumen	4.554.524.700
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	40 Pegawai	4.551.473.200

2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.645.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	11.240.100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana	1 Jenis	29.691.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	29.691.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor	7 Jenis	409.139.600
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12.026.100
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	3 paket	131.297.000
4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 paket	45.773.800
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	22.100.000
4.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	69.135.200
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.500.000
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	98.307.500
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran	1 unit	0
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun	6 Jenis	157.167.700
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.197.700
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.970.000

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	1 Tahun	367.382.896
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	99.367.000
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	1.278.000
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	266.737.896
BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.203.4965.604
A	Program Penataan Desa	Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	42,73 Prosen	170.303.100
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	176 Desa	170.303.100
1.1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	60 Desa	46.716.900
1.2	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan prasarana Desa	412 Desa	123.586.200
B	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerja sama Desa	38,16 %	747.964.500
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya	88 desa	747.964.400
2.1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	180.913.300
2.2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	567.051.100
C	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu	30,33 %	10.065.399.264
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	1798 orang	10.065.399.264
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminis-trasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Dokumen	244.245.000

3.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	3 Dokumen	35.000.000
3.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dokumen	1.004.149.800
3.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5.266 Orang	7.154.951.564
3.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	85.728.000
3.6	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100 Laporan	474.053.500
3.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	125 Dokumen	55.000.000
3.8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	261.262.800
3.9	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	53 Desa	55.158.400
D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	21,84 %	1.051.298.840
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Jenis	1.051.298.840
4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga	170.184.700
4.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	50.000.000
4.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	32.763.700
4.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	300.000.000

4.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	7 Dokumen	498.350.440
-----	---	--	-----------	-------------

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3

Berisi :

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023
- 3.2 Efisiensi Anggaran
- 3.3 Realisasi Anggaran
- 3.4 Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

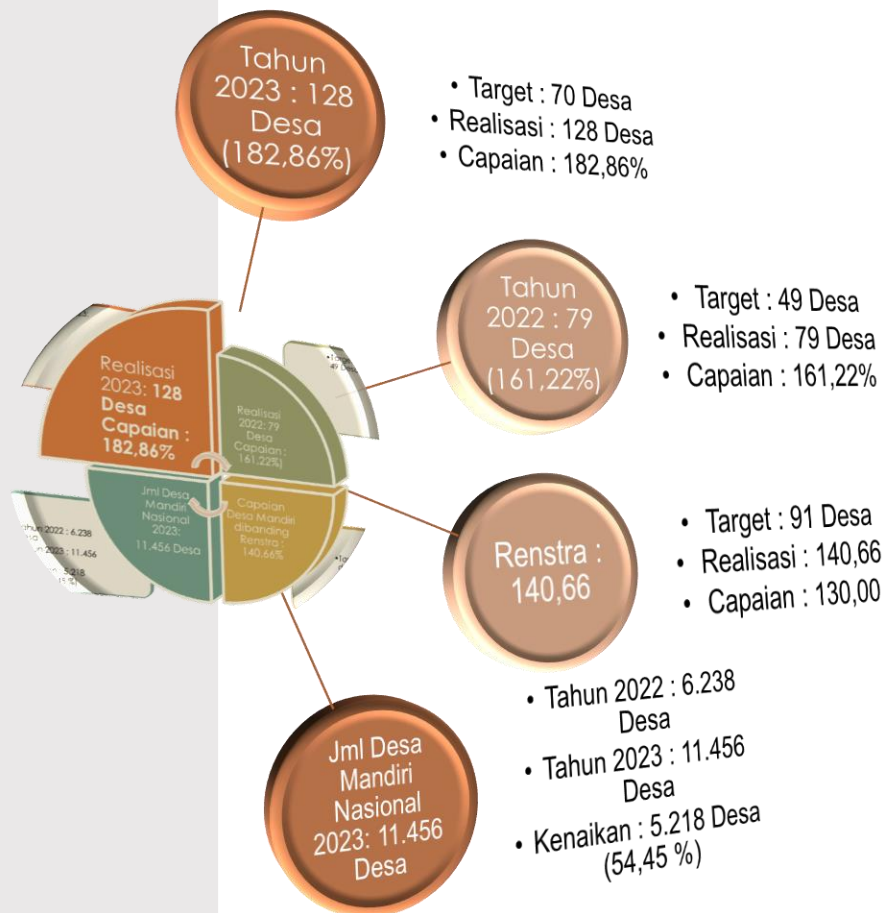
Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui Media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Berdasarkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023, dapat terlihat pada Gambar berikut :

TUJUAN : Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa

Indikator tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri. Target yang akan dicapai di tahun 2023 ini sebesar 70 Desa. Adapun Indikator Tujuan yang sudah dicapai di tahun 2023 sebesar 128 Desa Mandiri atau sebesar 182,86% dari target yang diharapkan.

Gambar 3.1
Capaian Indikator Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Cirebon Tahun 2023



Apabila kita bandingkan capaian Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa dengan jumlah desa mandiri pada Tahun 2023 dimana di Tahun 2022 jumlah desa mandiri sebanyak 79 desa atau sebesar 161,22 dari target yang ditetapkan, maka ada peningkatan capaian Jumlah desa mandiri sebesar 49 desa dan dari nilai persentase capaian antara Tahun 2023 (182,86%) dengan Tahun 2022 (161,22%) mengalami peningkatan sebesar 21,63%.

Jika di sandingkan dengan Target Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, capaian Kemajuan jumlah Desa mandiri pada Tahun 2023 sebesar 128 desa atau 140,66% dimana target yang ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun terakhir Renstra Perubahan sebesar 91 Desa. Persentase Capaian Kemajuan jumlah Desa mandiri Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian Renstra sebesar 130% masih tetap lebih tinggi sebesar 42,20%.

Capaian Nasional Jumlah Desa Mandiri di tahun 2022 sejumlah 6.238 Desa sedangkan di Tahun 2023 sejumlah 11.456 Desa, mengalami kenaikan sebesar 5.128 desa atau sebesar 54,45%. Kenaikan capaian Jumlah Desa Mandiri di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2023 sebesar 21,63% masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional dengan selisih sebesar 22,82%.

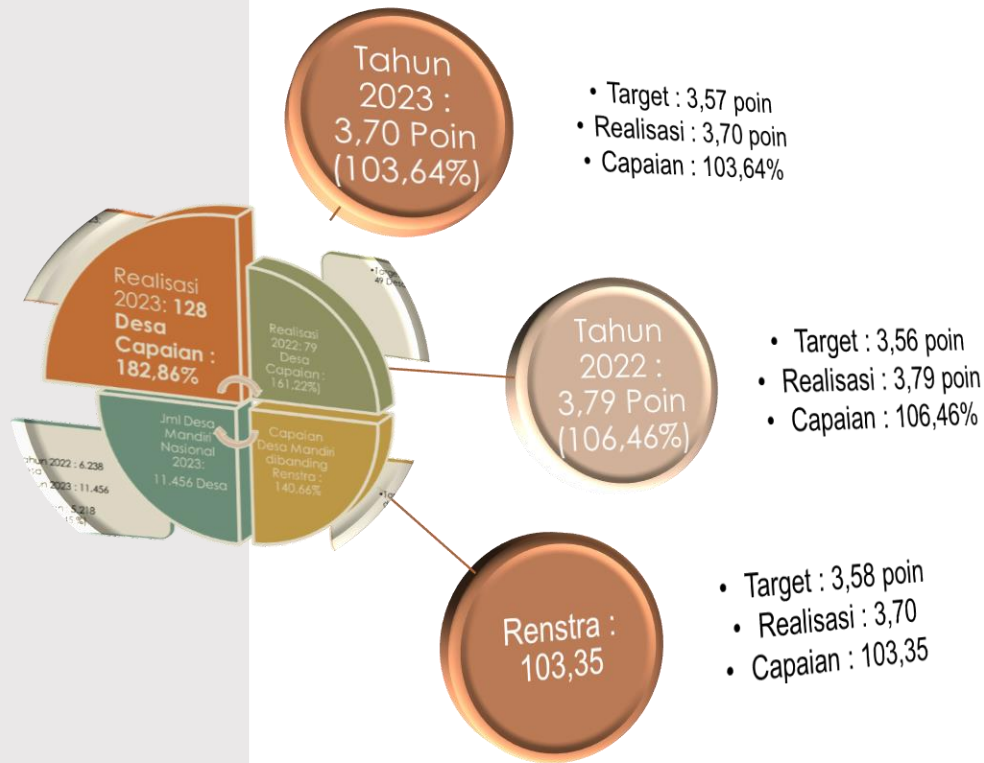
Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Tujuan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama Tujuan / Sasaran	Rumus/ Perhitungan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	$IDM = 1/3(IKS+IKE+IKL)$	49 Desa	79 Desa (161.22%)	70 Desa	128 Desa (182,86%)

SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD

Indikator Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemerintahan dan Desa adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Target yang akan dicapai di tahun 2023 ini sebesar 3,57 Poin. Adapun Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah dicapai di tahun 2023 sebesar 3,70 Poin atau sebesar 103,64% dari target yang diharapkan.

Gambar 3.2
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Cirebon Tahun 2023



Apabila kita bandingkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2023 dimana di Tahun 2022 Capaian IKM sebesar 3,79 poin atau sebesar 106,46% dari target yang ditetapkan dimana target di tahun 2022 sebesar 3,56 poin, maka ada penurunan dalam pencapaian IKM sebesar 0,07 poin dan dari persentase capaian antara Tahun 2023 (103,64%) dengan Tahun 2022 (106,46%) mengalami penurunan sebesar 3,58%.

Jika di sandingkan dengan Target Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, capaian IKM pada Tahun 2023 sebesar 3,70 poin atau 103,64% dimana target yang ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun terakhir Renstra Perubahan sebesar 3,58 poin. Persentase Capaian IKM Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian Renstra sebesar 103,35%. Capaian IKM Tahun 2023 (103,64%) masih tetap lebih tinggi sebesar 0,29% jika dibandingkan dengan Capaian IKM Target Akhir Renstra.

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran IKM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama Tujuan / Sasaran	Rumus/ Perhitungan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah Unsur (n)	3,56 poin	3,79 poin (106,46%)	3,57 poin	3,70 poin (103,64%)

Hasil dari survei kepuasan masyarakat pada tahun 2023 secara umum kualitas pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dipersepsikan SANGAT BAIK oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh berkisar antara 3,532 – 4,00 poin, nilai SKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 3,70 (Kategori SANGAT BAIK). Upaya evaluasi terhadap pelayanan publik ini diharapkan dapat terlaksana secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun agar pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat secara optimal melakukan perbaikan ataupun peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun Program yang mendukung capaian sasaran 1 adalah A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang memiliki 22 Sub Kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.5.655.424.896,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.4.845.308.386,- (85,68%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.810.116.510,- (14,32%). **Out Come Program** adalah

- a) Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur;
- c) Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas;
- d) Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif;
- e) Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral;

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 120.685.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.823.900,- sisa sebesar Rp. 240.000,- atau tercapai sebesar 82,71%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja dalam 1 tahun dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 39.270.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.014.000,- sisa sebesar Rp. 9.256.000,- atau tercapai sebesar 76,43%, **Output Sub Kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rencana Kerja Murni, Perubahan dan Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan) 5 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral tercapai 100%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Alokasi dana sebesar Rp. 10.856.000,- dengan realisasinya Rp. 10.856.000,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00 % **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran 2 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral tercapai 100%.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD Alokasi dana sebesar Rp. 28.456.700,- dengan realisasinya Rp. 28.456.700,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00 % **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2 Dokumen . **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral tercapai 100%.
 - d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 28.374.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.374.000,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun sebanyak 4 Dokumen dan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sebanyak 3 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif tercapai 100%.
 - e. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 13.728.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.123.200,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 11.605.500 atau tercapai sebesar 15,47% **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif tercapai 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 4.571.358.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.827.433.521,- sisa sebesar Rp. 743.924.779,- atau tercapai sebesar 83.73%,

Output Kegiatan adalah Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 tahun dan Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp. 4.551.473.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.807.548.421,- sisa sebesar Rp. 743.924.779,- atau tercapai sebesar 83,66%, **Output Sub Kegiatan** adalah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulannya sebanyak 26 Pegawai. **Outcome Program** adalah Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas tercapai 100%.
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 8.645.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.645.000,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif tercapai 100%.
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 11.240.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.240.100,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Jumlah Laporan Realisasi Keuangan bulanan / triwulanan / semesteran sebanyak 18 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif tercapai 100%.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 29.691.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.691.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana dan Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.691.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.691.000,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (2 paket). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 99,49%.
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 409.139.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 384.600.762,- sisa sebesar Rp.24.538.838,- atau tercapai sebesar 94,00 %, **Output Kegiatan** adalah Jumlah jenis pelayanan dan kebutuhan penunjang kantor, dan Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.026.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.026.100,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan (10 paket). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 99,49%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 131.297.000,- dan terealisasi sebesar Rp.131.297.000,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia (5 paket). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 99,49%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.539.800 dan terealisasi sebesar Rp. 45.773.800,- dan sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (10 paket). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 99,49%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.100.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia (12 Dokumen). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 99,49%.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.135.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.135.200,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (11 paket). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 99,49%.
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.500.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 laporan. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 99,49%.
- g. Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.307.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.768.662,- sisa sebesar Rp. 24.538.838,- atau

tercapai sebesar 75,04%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (53 laporan). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 99,49%.

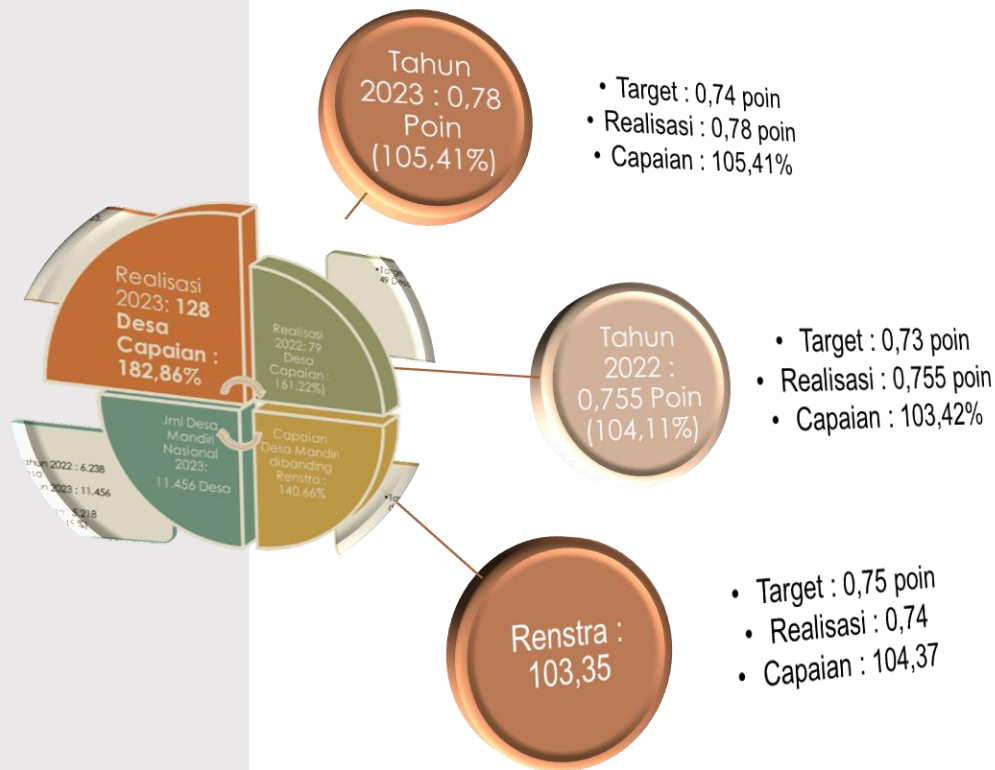
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 157.167.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 144.732.707,- sisa sebesar Rp. 12.434.993,- atau tercapai sebesar 92,09%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan dalam 1 tahun, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.197.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 102.762.707,- sisa sebesar Rp. 12.434.993,- atau tercapai sebesar 89,21%. **Output Sub kegiatan** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 Laporan). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 99,49%.
 - b. Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.970.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (12 Dokumen). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 99,49%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 367.382.896,- dan terealisasi sebesar Rp. 359.026.496,- sisa sebesar Rp. 8.356.400,- atau tercapai sebesar 97,73%. **Output Kegiatan** adalah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.367.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.722.100,- sisa sebesar Rp. 7.644.900 atau tercapai 92,31%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (14 unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur tercapai 123,81%.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.278.000,- dan terealisasi sebesar Rp.566.500,- sisa sebesar Rp. 711.500,- atau tercapai 44,33%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (6 unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur tercapai 123,81%.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 266.737.896,- dan terealisasi sebesar Rp. 266.737.896,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur tercapai 123,81%.

SASARAN 2 : Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun

Indikator Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemerintahan dan Desa adalah **Indeks Desa Membangun** Target yang akan dicapai di tahun 2023 ini sebesar 0,74 Poin. Adapun Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang sudah dicapai di tahun 2023 sebesar 0,78 Poin atau sebesar 105,41% dari target yang diharapkan.

Gambar 3.3
Capaian Indikator Indeks Desa Membangun
Kabupaten Cirebon Tahun 2023



Apabila kita bandingkan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) pada Tahun 2023 dimana di Tahun 2022 Capaian IDM sebesar 0,755 poin atau sebesar 103,42% dari target yang ditetapkan dimana target di tahun 2022 sebesar 0,73 poin, maka ada kenaikan dalam pencapaian IDM sebesar 0,025 poin dan dari persentase capaian antara Tahun 2023 (105,41%) dengan Tahun 2022 (103,42%) mengalami kenaikan sebesar 1,99%.

Jika di sandingkan dengan Target Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, capaian IDM pada Tahun 2023 sebesar 0,78 poin atau 104,00% dimana target yang ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun terakhir Renstra Perubahan sebesar 0,75 poin. Persentase Capaian IDM Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian Renstra sebesar 104,37%. Capaian IDM Tahun 2023 (105,41%) masih tetap lebih tinggi sebesar 1,41% jika dibandingkan dengan Capaian IDM Target Akhir Renstra.

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran IDM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama Tujuan / Sasaran	Rumus/ Perhitungan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah rata-rata IDM dari 412 desa	0,73 poin	0,755 poin (103,42%)	0,74 poin	0,78 poin (105,41%)

Hasil dari Penilaian Indeks Desa Membangun (SDM) tahun 2023 tertuang dalam Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

Adapun Program yang mendukung dalam Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung capaian sasaran 2 - Meningkatnya Status rata-rata Indeks terdiri dari 3 (tiga) Program dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.11.287.001.204,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.313.786.424,- sisa sebesar Rp. 2.973.214.780,- atau tercapai sebesar 73,66%. Adapun Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 170.303.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 168.730.800,- sisa sebesar Rp. 1.572.300,- atau tercapai sebesar 99,08%. Out Come Program ini adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya tercapai 16,76% (39,22%), Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 170.303.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 168.730.800,- sisa sebesar Rp. 1.572.300,- atau tercapai sebesar 99,08%, Output Kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.716.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.598.900,- sisa sebesar Rp. 1.118.000,- atau tercapai sebesar 97,61%. Output sub kegiatan adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desanya (69 Desa), Out Come Program ini adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya tercapai 16,76% (39,22%);

2) Sub Kegiatan Fasilitas Sarana Prasarana Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.586.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.131.900,- sisa sebesar Rp. 454.300,- atau tercapai sebesar 99,63%. Output sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan prasarana Desa (412 unit), Outcome Program adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya tercapai 16,76% (39,22%).

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.065.399.264 dan terealisasi sebesar Rp. 7.123.243.184 sisa sebesar Rp.2.942.156.080 atau tercapai sebesar 70,77%.

Out Come Program ini adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 9,47% (31,22%). Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 10.065.399.264 dan terealisasi sebesar Rp. 7.123.243.184 sisa sebesar Rp.2.942.156.080 atau tercapai sebesar 70,77%. **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.245.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 244.000.000,- sisa sebesar Rp. 245.000,- atau tercapai sebesar 99,90%, **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (40 Dokumen). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 9,47% (31,22%).

2) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau tercapai sebesar 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (3 Dokumen). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 9,47% (31,22%).

3) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.004.149.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 196.896.200,- sisa sebesar Rp. 807.253.600,- atau tercapai sebesar 19,61%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Pengelolaan

- Keuangan Desa (4 Dokumen). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 9,47% (31,22%).
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.850.801.764,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.750.198.184,- sisa sebesar Rp. 2.100.603.580,- atau tercapai sebesar 73,24%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (9004 orang). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 9,47% (31,22%).
 - 5) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.728.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 85.228.000,- sisa sebesar Rp. 500.000,- atau tercapai sebesar 99,42%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (1 dokumen). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 9,47% (31,22%).
 - 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 474.053.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 469.007.000,-sisa sebesar Rp. 5.046.500,- atau tercapai sebesar 98,94%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (100 lap). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 9,47% (31,22%).
 - 7) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.000.000,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Profil Desa (100 laporan). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 9,47% (31,22%).
 - 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.262.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 233.078.300,- sisa sebesar Rp. 28.184.500,- atau tercapai sebesar 89,21%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (2 dokumen), **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 9,47% (31,22%).
 - 9) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.158.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.835.500,- sisa sebesar Rp. 322.900,-

atau tercapai sebesar 99,41%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (53 Desa) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetepan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 9,47% (31,22%).

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.051.298.840,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.021.812.440,- sisa sebesar Rp. 29.486.400,- atau tercapai sebesar 97,20%. **Out Come Program** ini adalah : Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 20,30% (92,95%). Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.051.298.840,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.021.812.440,- sisa sebesar Rp. 29.486.400,- atau tercapai sebesar 97,20%. **Out Come Program** ini adalah : Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 20,30% (92,95%), Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.184.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 167.380.300,-, sisa sebesar Rp. 2.804.400,- atau tercapai sebesar 98,35%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (5 Lembaga). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 20,30% (92,95%).
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.875.000,- sisa sebesar Rp. 125.000,- atau tercapai sebesar 99,75%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (3 Dokumen).

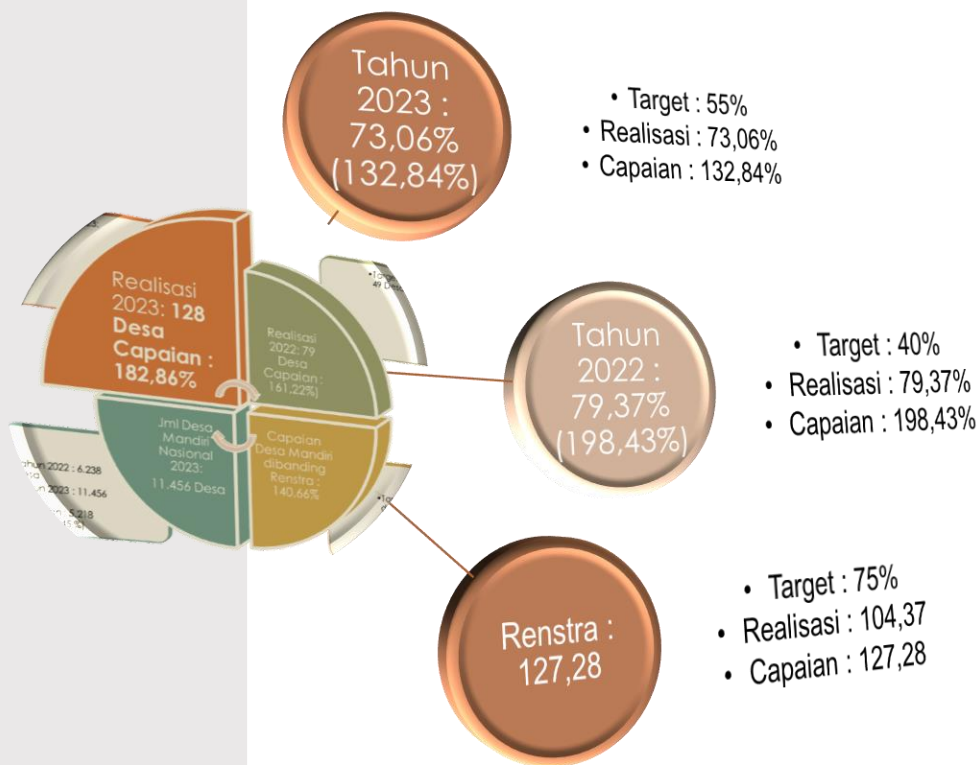
Outcome Program adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 20,30% (92,95%).

- 3) Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.763.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.023.300,-, sisa sebesar Rp. 740.400,- atau tercapai sebesar 97,74%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (2 laporan), **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 20,30% (92,95%).
- 4) Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 299.222.600,-, sisa sebesar Rp. 777.400,- atau tercapai sebesar 99,74%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Laporan Rekap Keg. BBGRM 40 Dokumen (100%). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 20,30% (92,95%).
- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 498.350.440,- dan terealisasi sebesar Rp. 473.311.240,-, sisa sebesar Rp. 25.039.200,- atau tercapai sebesar 94,98%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (6 dokumen). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 20,30% (92,95%).

SASARAN 3 : Meningkatnya Jumlah Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa

Indikator Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemerintahan dan Desa adalah **Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes**. Target yang akan dicapai di tahun 2023 ini sebesar 55 Persen. Adapun Indikator Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes yang sudah dicapai di tahun 2023 sebesar 73,06% atau sebesar 132,84% dari target yang diharapkan.

Gambar 3.4
 Capaian Indikator Persentase Jumlah Desa yang memiliki
 Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan di APBDes
 Kabupaten Cirebon Tahun 2023



Apabila kita bandingkan Realisasi capaian Indikator Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan di APBDes Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 dimana di Tahun 2022 sebesar 79,37% atau sebesar 198,43% dari target yang ditetapkan dimana target di tahun 2022 sebesar 40%, maka ada penurunan dalam Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan di APBDes Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebesar 6,31% dan dari persentase capaian antara Tahun 2023 (132,84%) dengan Tahun 2022 (198,43%) mengalami penurunan sebesar 65,59%.

Jika disandingkan dengan Target Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Realisasi Capaian Indikator Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan di APBDes Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 sebesar 104,37% dimana target yang ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun terakhir Renstra Perubahan sebesar 70%. Persentase Capaian Indikator Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan di APBDes Kabupaten Cirebon Tahun 2023 jika dibandingkan

dengan capaian Renstra sebesar 127,28%. Capaian Indikator ini di Tahun 2023 (132,84%) masih tetap lebih tinggi sebesar 5,56% jika dibandingkan dengan Capaian IDM Target Akhir Renstra.

Tabel 3.4
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan di APBDes Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama Tujuan / Sasaran	Rumus/ Perhitungan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan di APBDes	Persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan di APBDes	40%	79,37% (198,43%)	55%	73,06% (132,84%)

Adapun Program yang mendukung dalam Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung capaian sasaran 3 - Meningkatnya Jumlah Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa terdiri dari 1 (satu) Program dan 2 (dua) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.10.235.702.364,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.291.973.984,- sisa sebesar Rp. 2.943.728.380,- atau tercapai sebesar 71,24%. Adapun Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 747.964.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 721.928.950,- sisa sebesar Rp.26.035.450,- atau tercapai sebesar 96,52%. **Out Come Program** ini adalah Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa (6,31%) tercapai 16,54%, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Desa dengan anggaran sebesar Rp. 747.964.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 721.928.950,- sisa sebesar Rp. 26.035.450,- atau tercapai sebesar 96,52%. **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitas Kerjasama antar Desanya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.913.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 157.695.950,- sisa sebesar Rp. 23.217.350,- atau tercapai sebesar 87,17 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen

Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (12 Dokumen), **Outcome Program** adalah Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa (6,31%) tercapai 16,54%.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 567.051.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 564.233.000,- sisa sebesar Rp. 2.818.100,- atau tercapai sebesar 99,50 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (7 Dokumen) **Outcome Program** adalah Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa (6,31%) tercapai 16,54%.

3.2 Efisiensi Anggaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. Suatu suatu Program, Kegiatan dan Sub kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan in-efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Efektifitas adalah perbandingan antara ratio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu suatu Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah daripada pencapaian output.

Rata-rata Pencapaian target kinerja telah sesuai harapan atau dapat dikategorikan bahwa Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan baik/berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan semua kegiatan yang menyangkut Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, termasuk di dalamnya adalah Kegiatan Non Urusan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Tujuh (7) Kegiatan, dan Dua Puluh Dua (22) Sub Kegiatan. Sementara itu Program Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2023 didukung melalui Empat (4) Program, dengan Empat (4) Kegiatan, dan Sembilan belas (18) Sub Kegiatan.

3.3 Realisasi Anggaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Tujuh (7) Kegiatan, dan Dua Puluh Dua (22) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.655.424.896,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 4.845.308.386,- (85,68%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 810.116.510,- (14,32%).

Sementara itu Program Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2023 didukung melalui Empat (4) Program, dengan Empat (4) Kegiatan, dan Sembilan belas (18) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp. 12.034.965.604,- dengan terealisasi anggaran sebesar Rp.9.035.715.374,- sisa sebesar Rp. 2.999.250.230,- atau tercapai sebesar 75,08%.

Adapun Realisasi belanja yang diserap pada tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 3.6 dan tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.5
Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2023

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	PERSEN (%)
5.	BELANJA DAERAH	17.690.390.500	13.881.023.760	3.809.366.740	78,47
5.1.	BELANJA OPERASI	17.559.093.500	13.749.726.760	3.809.366.740	78,31
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.551.473.200	3.807.548.421	743.924.779	83,66
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.007.620.300	9.942.178.339	3.065.441.961	76,43
5.2.	BELANJA MODAL	131.297.000	131.297.000	-	100,00
5.2.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.297.000	131.297.000	-	100,00
5.2.1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET KINERJA (OUTPUT)	SATUA N	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	BELANJA DAERAH	17.690.390.500			13.881.023.760	78,47	3.809.366.740	21,53
	BELANJA OPERASI	17.559.093.500			13.749.726.760	78,31	3.809.366.740	21,69
	BELANJA MODAL	131.297.000			131.297.000	100,00	0	0
	BELANJA NON URUSAN	5.655.424.896			4.845.308.386	85,68	810.116.510	14,32
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.655.424.896			4.845.308.386	85,68	810.116.510	14,32
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.685.400			99.823.900	82,71	20.861.500	17,29
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.270.000			30.014.000	76,43	9.256.000	23,57
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.856.000			10.856.000	100,00	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.456.700			28.456.700	100,00	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.374.000			28.374.000	100,00	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.728.700			2.123.200	15,47	11.605.500	84,53
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.571.358.300			3.827.433.521	83,73	743.924.779	16,27
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.551.473.200			3.807.548.421	83,66	743.924.779	16,34
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.645.000			8.645.000	100,00	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.240.100			11.240.100	100,00	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.691.000			29.691.000	100,00	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.691.000			29.691.000	100,00	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.139.600			384.600.762	94,00	24.538.838	6,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.026.100			12.026.100	100,00	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.297.000			131.297.000	100,00	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.773.800			45.773.800	100,00	0	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.100.000			22.100.000	100,00	0	0
	Penyediaan Bahan/Material	69.135.200			69.135.200	100,00	0	0
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.500.000			30.500.000	100,00	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.307.500			73.768.662	75,04	24.538.838	24,96
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0			0	0	0	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0			0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.167.700			144.732.707	92,09	12.434.993	7,91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.197.700			102.762.707	89,21	12.434.993	10,79
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.970.000			41.970.000	100,00	0	0

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.382.896			359.026.496	97,73	8.356.400	2,27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.367.000			91.722.100	92,31	7.644.900	7,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.278.000			566.500	44,33	711.500	55,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.737.896			266.737.896	100,00	0	0
	BELANJA URUSAN	12.034.965.604			9.035.715.374	75,08	2.999.250.230	24,98
	PROGRAM PENATAAN DESA	170.303.100			168.730.800	99,08	1.572.300	0,92
	Penyelenggaraan Penataan Desa	170.303.100			168.730.800	99,08	1.572.300	0,92
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	46.716.900			45.598.900	97,61	1.118.000	2,39
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	123.586.200			123.131.900	99,63	454.300	0,37
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	747.964.400			721.928.950	96,52	26.035.450	3,48
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	747.964.400			721.928.950	96,52	26.035.450	3,48
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	180.913.300			157.695.950	87,17	23.217.350	12,83
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	567.051.100			564.233.000	99,50	2.818.100	0,50
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.065.399.264			7.123.243.184	70,77	2.942.156.080	29,23
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.065.399.264			7.123.243.184	70,77	2.942.156.080	29,23
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	244.245.000			244.000.000	99,90	245.000	0,10
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	35.000.000			35.000.000	100,00	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.004.149.800			196.896.200	19,61	807.253.600	80,39
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.850.801.764			5.750.198.184	73,24	2.100.603.580	26,76
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	85.728.000			85.228.000	99,42	500.000	0,58
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	474.053.500			469.007.000	98,94	5.046.500	1,06
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	55.000.000			55.000.000	100,00	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	261.262.800			233.078.300	89,21	28.184.500	10,79
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	55.158.400			54.835.500	99,41	322.900	0,59
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.051.298.840			1.021.812.440	97,20	29.486.400	2,80
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.051.298.840			1.021.812.440	97,20	29.486.400	2,80
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	170.184.700			167.380.300	98,35	2.804.400	1,65
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah	50.000.000			49.875.000	99,75	125.000	0,25

	Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	32.763.700			32.023.300	97,74	740.400	2,26
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	300.000.000			299.222.600	99,74	777.400	0,26
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	498.350.440			473.311.240	94,98	25.039.200	5,02

3.4 Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor-faktor yang mendorong tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain dipengaruhi oleh :

1. Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
2. Kemampuan sumber daya manusia aparatur yang memadai
3. Komitmen pimpinan dalam menjalin koordinasi pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Komitmen aparatur Dinas PMD dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal
5. Dukungan masyarakat, pemerintah desa dan lintas sektor lainnya dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa juga menghadapi beberapa Kendala atau hambatan. Kendala atau Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain sebagai berikut:

1. Belum intensifnya koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa yang berkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
2. Belum intensifnya koordinasi antara aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes
3. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu menggerakkan ekonomi desa
4. Tingkat Kerjasama Antar Desa dalam mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang nantinya akan bisa membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum terjalin dengan optimal;
5. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah desa diharapkan dapat menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Kesejahteraan masyarakat desa, kemajuan desa, dan kemandirian desa tidak akan terwujud manakala seluruh elemen masyarakat dari berbagai kalangan tidak berpartisipasi dalam membangun desa
2. Perlu dilakukan Bimtek terkait Penyusunan Rancangan Peraturan desa yang merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
3. Sosilasaki keberadaan Bumdes sehingga mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan BUMDes tersebut dan Peningkatan Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan
4. Perlu dilakukan kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kerjasama desa baik antar desa maupun dengan pihak lain
5. Perlu dilakukan kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa.

PENUTUP

BAB 4

Berisi :

4.1 Kesimpulan

4.2 Rencana Tindaklanjut

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 :
 - a. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD (IKM)” tercapai sebesar 3,70 poin dari target sebesar 3,57 poin atau sebesar 103,73%;
 - b. Sasaran Strategis “ Meningkatkan Status Rata-rata Indeks Desa membangun (IDM) tercapai sebesar 0,78 poin dari target sebesar 0,74 poin atau sebesar 105,41%;
 - c. Sasaran Strategis “Meningkatnya persentasen jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDEs” tercapai sebesar 73,06% dari target sebesar 55% atau sebesar 132,84%.
2. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditopang oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat pola komunikasi, informasi, advokasi dan pendampingan yang telah melembaga berkaitan dengan upaya tata kelola pemerintahan.
 - b. Koordinasi dan pola kerja lintas sektor yang semakin melembaga, didukung pemanfaatan media sosial dan aplikasi-aplikasi yang memudahkan.
 - c. Kontinuitas upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat menghasilkan deteksi dini atas permasalahan kinerja untuk selanjutnya dilakukan treatment solusi atas permasalahan kinerja.

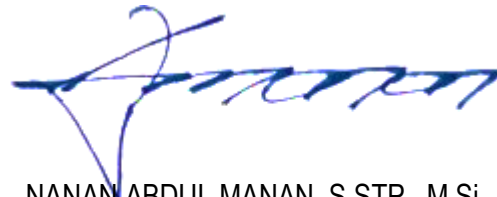
4.2 Rencana Tindaklanjut

Menghadapi tantangan tugas ke depan, rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi, advokasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kepada Pemerintahan Desa.
2. Penguatan kapasitas, koordinasi dan pola kerja lintas sektor didukung pemanfaatan media sosial serta dukungan aplikasi yang efektif.
3. Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian laporan kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sumber, Februari 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19800703 199810 1 001